

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan pemilihan Judul**

Pada tahun 1980-an, proses demokrasi berlangsung lamban dan kurang mengejutkan, maka pada tahun 1990-an, proses tersebut berlangsung amat cepat yang ditandai oleh runtuhnya rezim komunis dan digantikan oleh suatu pemerintahan yang mengarah atau mengacu pada demokrasi, di mana konfrontasi dua kutub antara Uni Soviet dan AS telah berakhir. Ketika daerah-daerah di Eropa Timur dan Tengah tidak lagi berada dalam kungkungan kekuatan militer Soviet, mulailah terjadi gelombang protes dimana-mana. Bahkan, ketika Uni Soviet kolaps dan terpecah-pecah menjadi 15 negara terpisah yang memerintah secara mandiri, banyak dari pecahan-pecahan Uni Soviet tersebut yang mengklaim berjuang bagi pembentukan negara yang demokratis, salah satunya Rusia.

Rusia pasca Uni Soviet agaknya tengah dibangun menjadi sebuah Rusia Baru yang demokratis. Rusia memang telah memilih satu jalan baru, menyusul disintegrasi uni Soviet. Sebuah negara demokratis dengan system ekonomi pasar bebas sedang dibangun dalam masa transisional. Berbagai langkah politik baik nasional maupun internasional telah dilakukan untuk menegaskan sosok Rusia Baru yang telah menggantikan Rusia Soviet yang bercirikan komunisme dan system ekonomi sosialis yang terpusat (ekonomi komando), maka saat itu juga sistem pemerintahan baru dimulai di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin. Pada masa presiden Boris Yeltsin inilah sistem demokrasi dijalankan setelah hampir

kurang lebih 70 tahun Uni Soviet di bawah kekuasaan komunis. Hal itu berubah ketika Mikhail Gorbachev berkuasa dan melahirkan konsep-konsep baru tentang perubahan atau pembaharuan menuju demokrasi. Ketika pemerintahan dipimpin oleh Yeltsin, system Demokrasi yang diharapkan belum tercapai secara maksimal. Masih adanya budaya komunis yang melekat pada masyarakat menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, Yeltsin juga lebih condong ke arah liberalisme dimana lebih mengutamakan hak individu dan menghendaki kebebasan. Penguasaan terhadap sektor-sektor penting di bidang ekonomi oleh golongan borjuis sangat menonjol.<sup>1</sup>

Pembangunan konsep demokrasi tersebut diimplementasikan dengan membangun sistem baru dengan ditandai oleh adanya Republik Federasi Rusia berdasarkan pada demokrasi, yaitu dalam bentuk falsafah negara, Sistem Pemerintahan, Sistem Partai, Perekonomian. Konsolidasi demokrasi yang dibangun oleh rezim demokrasi pertama Rusia sudah terbentuk yaitu adanya lembaga negara yang merupakan representasi dari demokrasi, bahkan telah mengadakan pemilu beberapa kali.

Transisi Demokrasi atau Demokratisasi di Rusia merupakan kasus yang menarik dan banyak mengandung pro dan kontra baik di dalam dan luar negeri, seperti halnya kekhawatiran Collin Powell tentang semakin memprihatinkannya demokratisasi di Rusia. Kekhawatiran Collin Powell dan beberapa pengamat politik dunia mengenai perkembangan Rusia sudah menjadi rahasia umum dan

---

<sup>1</sup> A. Fahrurodji, *Rusia Baru Menuju Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2005.

khawatir akan membuat tercorengnya demokrasi itu sendiri. Perkembangan demokrasi di Rusia merupakan suatu pelajaran yang berharga dalam mempersiapkan suatu transisi demokrasi supaya tidak terjebak dalam hal yang serupa. Transisi demokrasi yang menuju kearah demokrasi beku ini merupakan keadaan yang sangat terbalik dengan keadaan seharusnya.

#### **B. Tujuan Penulisan :**

Tujuan dari penulisan ini adalah :

- Untuk mengetahui dan memahami proses transisi demokrasi yang terjadi di Rusia pasca pecahnya Uni Soviet.
- Untuk lebih memahami proses demokrasi yang terjadi di Rusia ketika masa pemerintahan Boris Yeltsin.
- Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **C. Latar Belakang Masalah :**

Revolusi yang terjadi di akhir dekade abad XX telah membawa kehancuran Uni Soviet yang telah dibangun selama lebih kurang tujuh dasawarsa. Uni Soviet secara resmi berakhir pada tanggal 25 Desember 1991 ketika Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengumumkan pengunduran diri menyusul kemelut politik sebagai kelanjutan kudeta yang gagal pada pertengahan bulan Agustus 1991. Kebangkitan kembali Rusia dapat dicapai dengan tiga alternatif

cara. Pertama, adalah dengan kembalinya Rusia pada system pra-Bolshevik dengan mengadopsi elemen-elemen imperium Rusia. Dengan cara ini diharapkan Rusia dapat meraih kembali kehormatan dan kejayaan Rusia pada masa lampau. Kedua, kembali ke system sosialisme Soviet. Kaum Sovietis ini beranggapan bahwa system inilah yang tepat untuk mengangkat kembali Rusia ke posisinya sebagai negara adikuasa yang disegani. Ketiga adalah jalan demokratisasi dengan mengadopsi nilai-nilai demokrasi barat.

Alternative kedua dan ketiga menemukan bentuknya dalam berbagai pergulatan politik yang tajam hingga berakhirnya pemerintahan presiden Boris Yeltsin. Pada masa ini terlihat terjadinya berbagai upaya golongan sosialis untuk kembali membawa negara ini ke system yang menjadi inti perjuangan mereka. Langkah reformasi dan liberalisasi pasar yang dikedepankan oleh Presiden Boris Yeltsin memperlihatkan penguatan versi ketiga arah perkembangan bangsa ini. Demokratisasi yang merupakan pilar perestroika, dilanjutkan pada masa pasca-komunis ini.<sup>2</sup>

Konsep Perestroika yang diungkapkan oleh Gorbachev merupakan embrio dari pecahan Uni Soviet dan sekaligus pintu masuk perkembangan demokrasi di Rusia. Peluncuran Perestroika bukanlah tidak ada alasan yang jelas tetapi, Gorbachev melihat keadaan Uni Soviet yang mengalami kelembaman perkembangan ekonomi ekstensif sedang menuju jalan buntu dan stagnasi ekonomi. Di bidang sosial budaya dan politik keadaan masyarakat berjalan tidak

---

<sup>2</sup> *Ibid*

menentu partai komunis sebagai organ pendamping dan pengarah kebudayaan semakin tidak bisa memainkan perannya.

Rusia sebagai negara pecahan dari Uni Soviet yang secara kebudayaan merupakan representatif besar dari Uni Soviet yang tidak ketinggalan memasuki kawasan demokratisasi sebagai pilihan dari sistem pemerintahannya. Rusia merupakan negara bagian terbesar dari Uni Soviet menyikapi hal ini dengan melanjutkan konsep pembaruan atau perestroikanya Gorbachev dengan dipimpin oleh Boris Yeltsin.

Dengan konsep Topdown pemerintahan Rusia yang membenahi negerinya dengan membangun konsep demokrasi. Pembangunan konsep demokrasi ini diimplementasikan dengan membangun system baru yaitu dengan dibentuknya Republik Federasi Rusia dengan dasar demokratisasi. Syarat- prasyarat dari demokrasi ini diwujudkan oleh Rusia dengan membangun bangunan demokrasi dalam system politiknya.

Rusia membangun pemerintahannya dengan system Republik Federasi dengan pengakuan akan kemajemukan ideologi sebagai perbaikan dari system komunis yang mengharuskan homogenitas dalam ideologi. Selain itu, Rusia membuat konstitusi yang menggambarkan kebebasan dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan kekuasaan negara yang tentunya dengan membawa panji demokrasi, Rusia dengan komando Yeltsin membagi kekuasaannya kedalam tiga kekuasaan secara terpisah dengan membentuk badan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Badan eksekutif Rusia di kepalai oleh Perdana Menteri dengan dibantu wakilnya dan menteri-menteri federal, sedangkan legislative dibagi menjadi dua

kamar yaitu dewan federasi dan дума negara. Dan kekuasaan yudikatif dijalankan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi.

Sistem partai yang tadinya sistem tunggal dengan ideologi komunisnya yang kental, sejak berdirinya Rusia dengan membawa panji demokrasi system kepartaian menjadi system multipartai. Rusia sebagai negara demokrasi baru menyelenggarakan pemilu sebagai representasi demokrasi.

Keadaan perekonomian Rusia sejak terpisah dari Uni Soviet mengalami penurunan yang sangat tajam dan sangat memprihatinkan, dengan melihat tersebut Yeltsin mengambil kebijakan tentang legalisasi privatisasi ( pertengahan 1994, 70% sumber perekonomian ditangan swasta) dalam usaha perekonomian dengan harapan untuk lebih meningkatkan kompetisi ekonomi dalam liberalitas.

Kepemimpinan Boris Yeltsin secara umum mempunyai ciri transisional dari system Uni Soviet kepada sebuah republik yang demokratis. Belum tertatanya secara tegas hubungan antar organ kekuasaan diyakini menjadi penyebab berbagai konflik politik yang terjadi di dalam negeri. Kebangkrutan ekonomi yang diwarisi dari Uni Soviet masih merupakan permasalahan krusial yang belum juga terselesaikan. Proses perpindahan ekonomi sentralistik kepada system pasar belum menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini diperparah dengan tersendatnya proses integrasi wilayah-wilayah bekas Uni Soviet ke dalam Federasi Rusia.

Pada masa Yeltsin inilah para oligarkhi mendapatkan ruang gerak yang sangat luas. Proses swastanisasi yang dicanangkan pada masa pemerintahan Boris Yeltsin merupakan konsekuensi logis dari upaya Rusia menuju system ekonomi pasar bebas. Artinya, bentuk kepemilikan komunal dan sebagian kepemilikan

negara harus dialihkan kepada kepemilikan swasta. Proses ini pada gilirannya memunculkan kelompok baru dalam masyarakat Rusia, yakni orang-orang yang berhasil menguasai perusahaan-perusahaan yang selama ini dikelola oleh negara. Proses swastanisasi yang terjadi di Rusia pada gilirannya menguntungkan kelompok tertentu, khususnya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Dengan melihat indikasi diatas, terlihat bahwa demokrasi yang berjalan di Rusia pada pemerintahan Yeltsin belum maksimal.

#### **D. Pokok Permasalahan :**

Bagaimana proses demokrasi yang berlangsung di Rusia pada masa pemerintahan Presiden Boris Yeltsin?

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran :**

Kerangka dasar pemikiran untuk menganalisa jalannya demokratisasi di Rusia pada masa Yeltsin ini menggunakan pendekatan konsep demokrasi, konsep kekuasaan dan proses transisi demokrasi.

#### **Konsep Demokrasi**

Demokrasi adalah sebuah system pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam system politik pemerintahan demokratis terdapat kebebasan dan kesamaan bagi setiap orang unruk menentukan pilihan hidupnya. Definisi ini lebih luas, karena mengandung makna pemerintahan yang memberi perlindungan hak-hak individu dan bersifat transparan.

Sumbangan pemikiran lainnya mengenai demokrasi dilontarkan oleh Robert A. Dahl yang mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah system politik. Menurut Dahl demokrasi yaitu system politik yang sepenuhnya responsive terhadap semua warga negara. Responsive yang dimaksud merupakan responsive yang mensyaratkan warga negara yang memiliki kesempatan untuk:

- Merumuskan pilihan mereka
- Menyampaikan pilihan mereka kepada sesama warga negara maupun pemerintah baik secara perorangan maupun kelompok
- Dalam menyampaikan pilihan tersebut diperlakukan sama oleh pemerintah tanpa memandang isi maupun sumber pilihan tersebut.

Ketiga kesempatan di atas pada gilirannya, tergantung pada sejumlah jaminan kelembagaan berikut ini :

- 1) Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi
- 2) Kebebasan mengeluarkan pendapat
- 3) Hak untuk memilih dalam pemilihan umum
- 4) Hak untuk menduduki jabatan publik atau pemerintahan
- 5) Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan dan suara
- 6) Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif
- 7) Tersedianya pemilihan umum yang bebas dan jujur

- 8) Adanya lembaga-lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung pada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya.<sup>3</sup>

Kedelapan jaminan kelembagaan ini merupakan cerminan dari ukuran demokrasi yang disebut diatas.

### **Konsep Kekuasaan**

Kekuasaan secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Secara lebih sempit, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup>

Sumber kekuasaan memiliki kategori-kategori seperti, sarana paksaan fisik, kekayaan dan harta benda (ekonomi), normatif, jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi, dan massa yang terorganisasi. Kemampuan pers (media massa) membentuk pendapat umum melalui pemberitaan, tajuk rencana, reportase, dan karikatur juga merupakan sumber kekuasaan. Persepsi baik-buruk, adil-tidak adil, benar-salah, menggembirakan-mencemaskan, dan optimis-pesimis dikalangan jutaan partisipan media tentang kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan pemerintah dapat dibentuk dan diarahkan dengan media massa. Pengaruh media massa dalam sistem politik demokrasi liberal yang cukup besar

<sup>3</sup> Dahl Robert A., *Poliarchy: Participation and Opposition*, (new heaven: Yale University Press, 1971), hal.3.

<sup>4</sup> Dahl Robert A., "The Concept of Power", (Berkeley, 1957), hal. 201.

mengakibatkan media massa dikategorikan sebagai kekuasaan keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam dimensi kekuasaan yang potensial dan aktual, seseorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial apabila dia memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisasi, dan jabatan. Sebaliknya, seseorang dipandang memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya kedalam kegiatan politik secara efektif (mencapai tujuannya). Dimensi kekuasaan positif dan negatif merupakan tujuan umum dari pemegang kekuasaan untuk mendapatkan ketaatan atau penyesuaian diri dari pihak yang dipengaruhi. Kekuasaan positif ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan, sedangkan kekuasaan negatif ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya dipandang tidak perlu, tetapi juga merugikan pihaknya.

Dimensi kekuasaan dalam bentuk jabatan dan pribadi, biasanya terdapat di dalam masyarakat yang sudah maju dan mapan. Kekuasaan terkandung erat dalam jabatan-jabatan, seperti presiden, perdana menteri, menteri-menteri, dan senator. Namun, penggunaan kekuasaan yang terkandung dalam jabatan itu secara efektif bergantung sekali pada kualitas pribadi yang dimiliki dan ditampilkan oleh setiap pribadi yang memegang jabatan. Oleh karena itu, pada masyarakat maju dan mapan baik jabatan maupun kualitas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan.

Dalam konsep kekuasaan, Yeltsin sebagai pemimpin tertinggi Rusia membuat dan melaksanakan kebijakan yang mengikat masyarakatnya. Yeltsin menggunakan jabatan yang dimilikinya untuk membuat kebijakan di berbagai bidang guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang politik, Yeltsin telah membuat kebijakan untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis. Sedangkan dalam bidang ekonomi, Yeltsin membuat kebijakan yaitu menerapkan langkah *Shock Therapy* yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Rusia yang terpuruk akibat runtuhnya rezim komunis. Dalam pelaksanaan kebijakan *shock therapy* ini, Yeltsin ingin melakukan proses swastanisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik negara. Hal ini dilakukan untuk mengefisienkan dan merasionalisasikan terhadap penggunaan sumber-sumber ekonomi milik negara. Beberapa pasar domestik dibuka untuk jalur perdagangan internasional dimana arus barang yang datang dari luar negeri diperbolehkan. Langkah *shock therapy* ini juga untuk mengurangi subsidi pemerintah yang semakin membengkak.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Yeltsin ini selain bertujuan untuk memperbaiki kondisi negaranya, Ia juga mempunyai maksud tertentu yang bersifat individu. Seperti yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan ini yaitu pengaruh yang cukup kuat. Yeltsin juga berusaha mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya dengan mengatasnamakan bangsa Rusia. Padahal, tujuan utama dari apa yang dilakukan oleh Yeltsin untuk

Demokratisasi adalah proses dimana rezim-rezim otoriter beralih menjadi rezim-rezim demokratis. Pengertian ini harus dibedakan secara analitis dari liberalisasi dan transisi. Liberalisasi hanyalah pelunakan rezim otoriter itu sendiri. Proses itu mencakup penghapusan aspek-aspek terburuk dari otoriterisme. Liberalisasi merupakan langkah awal dari transisi menuju demokrasi. Bagaimanapun, transisi menuju demokrasi baru benar-benar dimulai ketika pemimpin otoriter tidak lagi mampu mengendalikan perkembangan-perkembangan politik domestik dan terpaksa melepaskan dominasinya.

### **Proses Transisi Demokrasi**

Studi mengenai transisi menuju demokrasi dan konsolidasi demokrasi berkembang pesat setelah demokrasi ketiga melanda dunia. Otoriterisme atau rezim otoriter adalah fenomena yang dihasilkan dari pemerintahan ademokratis. Rezim otoriter biasanya menampilkan diri dalam tiga bentuk, yaitu Junta militer atau rezim sipil yang ditopang oleh militer, rezim personal yang kharismatik, dan rezim satu partai yang monopolistik.

Transisi politik mewakili fase bergantinya system politik dari suatu negara. Transisi menuju demokrasi menjelaskan peristiwa berubahnya suatu rezim otoriter ke system politik yang lebih demokratis, transisi ini dapat menghasilkan suatu rezim demokratis ataupun kembali pada rezim otoriter yang lain. Fase ini ditandai dengan adanya liberalisasi politik atau dekompresi terhadap publik. Fase ini diawali pada saat rezim otoriter itu jatuh dan berakhir apabila sudah terbentuk rezim baru. Apabila fase transisi ini berakhir dengan terbentuknya rezim

demokratis baru maka fase selanjutnya adalah konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi mengindikasikan bahwa system demokrasi tetap bertahan apapun keadaannya. Konsolidasi demokrasi dapat dinyatakan oleh tingkat konsentrasi politik yang tinggi pula.

Samuel P. Huntington menyebutkan bahwa terjadinya proses transisi demokrasi dari rezim-rezim non demokratis dapat melalui empat proses, yaitu:

1. *Transformasi* atau *Reforma*, yaitu demokratisasi yang muncul karena elit penguasa dari suatu negara mengambil prakarsa untuk memimpin upaya demokratisasi yang bertujuan untuk memperbaiki situasi dan kondisi negaranya tersebut.
2. *Replacement* atau *Ruptura*, yaitu demokratisasi muncul karena adanya kelompok oposisi yang memimpin perjuangan menuju demokrasi.
3. *Transplacement* atau *Ruptforma*, yaitu demokratisasi berlangsung sebagai akibat negosiasi dan *bargaining* antara pemerintah dengan kelompok oposisi.
4. *Intervensi*, yang jarang terjadi yaitu demokratisasi muncul karena adanya lembaga-lembaga demokratis yang dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor dari luar.<sup>5</sup>

Oleh karena itu sebuah negara memasuki fase transisi yang diawali dengan perpecahan rezim otoriter dan dimulainya proses institusionalisasi nilai-nilai dan lembaga yang demokratis jadi fase yang paling genting dan krusial. Kebanyakan

---

<sup>5</sup> S. P. Huntington, *Demokrasi dan Otoriterisme*, Cetakan Kedua, 2000, hal. 159

kegagalan dalam fase transisi ini menyebabkan kembalinya militer atau kediktatoran individual dalam kehidupan politik.

Berdasarkan teori dari Huntington di atas, demokratisasi Rusia di bawah Yeltsin menggunakan model *Transformasi* atau *Reforma*, yakni transisi demokrasi yang dipelopori oleh elit penguasa (presiden). Warisan budaya masa lampau Rusia tentang ideologi komunisme masih melekat pada diri para pemimpin Rusia. Seperti pada masa sebelumnya ketika Uni Soviet berkuasa, Mikhail Gorbachev memimpin suatu perubahan atas negara tersebut. Begitu halnya dengan Boris Yeltsin sebagai pemimpin tertinggi Federasi Rusia, Yeltsin memimpin negaranya guna menyongsong sistem pemerintahan baru yaitu menuju demokrasi yang bertujuan untuk memperbaiki tatanan kehidupan Rusia yang berantakan akibat komunis. Selain itu, Yeltsin ingin melanjutkan gagasan-gagasan Gorbachev yang gagal pada masa sebelumnya (Uni Soviet). Akan tetapi, Yeltsin mempunyai tujuan lain menggunakan sistem demokrasi ini hanya untuk menaikkan pamor Yeltsin yang mulai turun pada masa pemerintahannya. Sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi Rusia, Yeltsin dengan bebas membuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang Yeltsin buat dan putuskan di atasnamakan demokrasi.

Adanya lembaga tinggi negara hanya sebagai simbol bahwa Rusia telah menjadi suatu negara demokrasi. Dalam pandangan Yeltsin jika kekuasaan eksekutif yang mempunyai wewenang yang lebih besar daripada legislative maka akan mempercepat reformasi ekonomi yang radikal untuk menaikkan taraf hidup masyarakat Rusia. Hal ini diasumsikan jika kekuatan legislatif yang mempunyai

..... lebih akan lebih terlibat pada lembaga kebijakan yang diambil karena

berdasarkan kompromi berbagai pihak yang berbeda pemikiran sehingga dikhawatirkan reformasi ekonomi yang radikal tidak bisa berjalan dengan mulus.

Selain itu, Yeltsin juga mencoba mengorbankan pemisahan kekuasaan negara sebagaimana dalam demokrasi liberal. Yeltsin mencoba memprioritaskan reformasi pasar. Dengan asumsi ini mereka berpendapat bahwa hasil dari reformasi pasar yang baik dapat mengakibatkan dampak positif terhadap konsolidasi demokrasi Rusia dimasa datang. Ketika era demokrasi dibawah Yeltsin, pola kebudayaan politik Rusia masih belum menciptakan situasi demokrasi yang diharapkan.

#### **F. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka teoritik yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diajukan hipotesis bahwa demokrasi di Rusia pada masa presiden Boris Yeltsin dijalankan secara lambat dan pada masa itu diwarnai dengan pengaruh yang sangat kuat dari rezim/elit yang berkuasa.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, penulis menekankan penggunaan batasan waktu pada masa pemerintahan Presiden Boris Yeltsin periode tahun 1991-1999. Ketika itu terjadi transisi demokrasi di Rusia yang menindaklanjuti konsep-konsep Mikhail Gorbachev pada waktu Uni Soviet berkuasa.

## **H. Metode Penelitian**

Dengan berdasarkan kerangka teori, kemudian ditarik hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris dengan teknik penulisan skripsi melalui studi kepustakaan dan data-data yang bersumber pada literature. Oleh karena itu, data yang akan diolah dan dikaji adalah data yang bersumber dari analisa data sekunder seperti makalah-makalah, buku-buku, surat kabar, kliping, internet dan dokumentasi lainnya.

## **I. Sistematika Penulisan**

### *Bab I Pendahuluan*

Dalam Bab I ini membahas Pendahuluan yang menjelaskan Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### *Bab II Gambaran Umum Rusia dan Rusia Masa Uni Soviet Serta Pembaharuan*

#### *Mikhail Gorbachev*

- A. Gambaran Umum Rusia
- B. Rusia di Masa Uni Soviet
- C. Pembaharuan Mikhail Gorbachev

### *Bab III Faktor pendukung dan penghambat terjadinya demokrasi pada masa*

#### *Boris Yeltsin*

- A. Latar Belakang Munculnya Demokrasi di Rusia
- B. Faktor-faktor Pendukung Demokrasi di Rusia Pada Masa Boris Yeltsin
- C. Faktor-faktor Penghambat Demokrasi di Rusia Pada Masa Boris Yeltsin

*Bab IV Proses Demokrasi Di Rusia Pada Masa Boris Yeltsin*

- A. Situasi Rusia Pasca Komunisme
- B. Rusia di bawah Pemerintahan Boris Yeltsin (1991-1999)
- C. Demokrasi Rusia Pada Masa Boris Yeltsin
- D. Dampak-dampak Demokrasi Boris Yeltsin

*Bab V Kesimpulan*